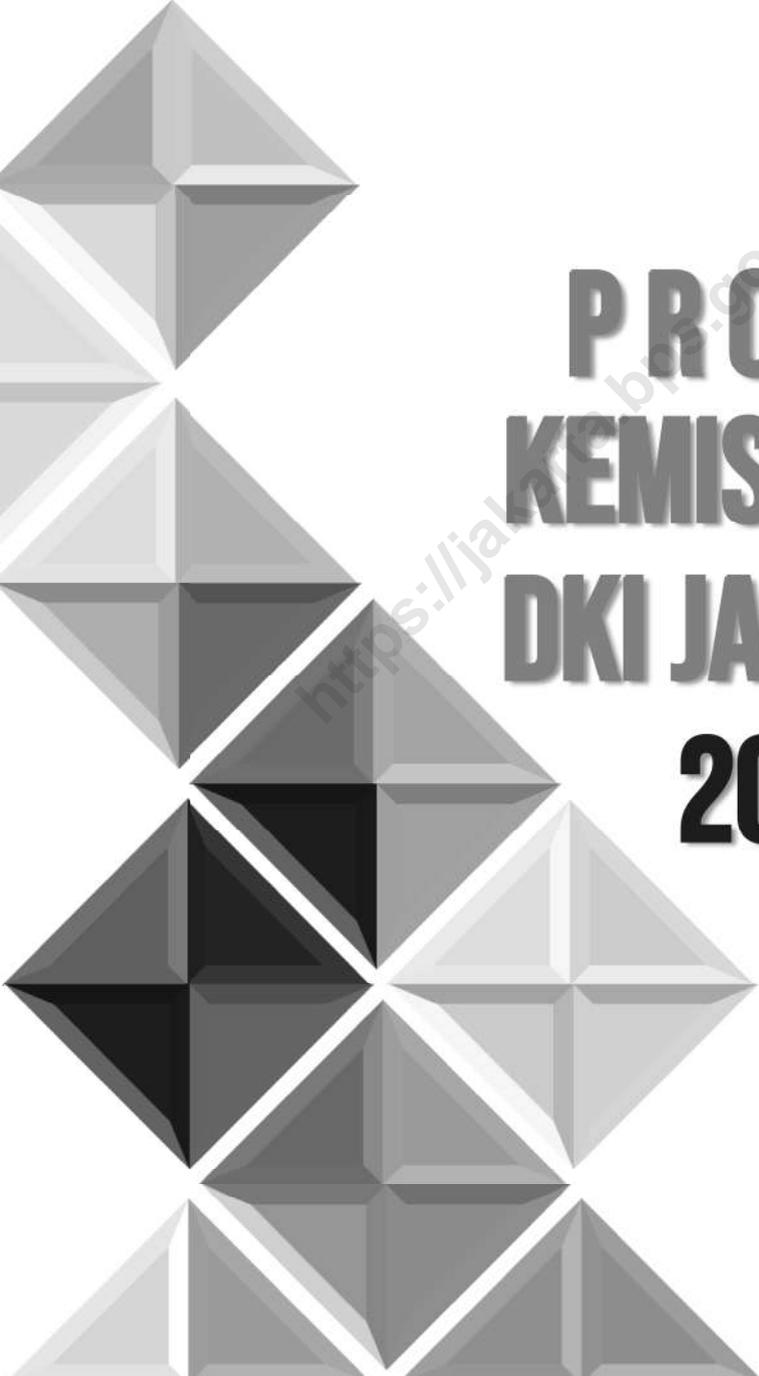


PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA 2017





**PROFIL
KEMISKINAN
DKI JAKARTA
2017**

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA, 2017

No. ISBN : -
No. Publikasi : 31520.1807
Katalog BPS : 3205005.31
Ukuran Buku : A5 (14,8 cm x 21 cm)
Jumlah Halaman : 48 + viii halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Desain Kover oleh: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sumber Ilustrasi: -

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

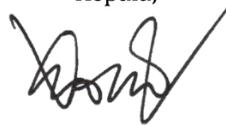
KATA PENGANTAR

Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2017 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berisi data tentang jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, karakteristik penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta Tahun 2017. Data-data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Susenas Maret dan September 2017.

Publikasi ini menyajikan tabulasi dan grafik tingkat kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta serta tabulasi dan grafik karakteristik penduduk miskin di DKI Jakarta selama tahun 2017.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengolahan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Nopember 2018
BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



THOMAN PARDOSI

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN PENULISAN.....	3
1.3 RUANG LINGKUP DAN DATA YANG DIGUNAKAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
II. METODOLOGI.....	6
2.1 METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN...	6
2.2 INDIKATOR KEMISKINAN.....	12
2.3 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN.....	14
III. KEMISKINAN DI DKI JAKARTA.....	24
3.1 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN..	24
3.2 PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN	27

	DAN KEPARAHAN KEMISKINAN.....	
	3.3 PERKEMBANGAN DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN.....	30
IV.	PROFIL KEMISKINAN.....	34
	4.1 PENDIDIKAN PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS.....	34
	4.2 KEGIATAN BEKERJA PENDUDUK MISKIN USIA 15 TAHUN KE ATAS.....	36
	4.3 PENGELUARAN PER KAPITA MAKANAN DAN NON MAKANAN PENDUDUK MISKIN	38
	4.4 PENGGUNAAN ALAT KB PENDUDUK MISKIN PADA WANITA USIA SUBUR.....	40

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), September 2016-Maret 2017-September 2017.....	28

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2013 - 2017..... 25
Gambar 2	Perkembangan Garis Kemiskinan, Tahun 2013-2017..... 27
Gambar 3	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Keparahan Kemiskinan (P_2), Maret 2013 – September 2017..... 30
Gambar 4	Perkembangan Koefisien Gini, September 2016 - September 2017..... 31
Gambar 5	Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk, September 2016 - September 2017..... 33
Gambar 6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2017..... 35
Gambar 7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Status Bekerja, Tahun 2017..... 36
Gambar 8	Persentase Pengeluaran Per Kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin, Tahun 2017..... 39
Gambar 9	Persentase Wanita Usia Subur (15-49 tahun) Berstatus Miskin Yang Menggunakan Alat KB, Tahun 2017..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman	
Lampiran 1	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, Maret 2013 - September 2017.....	43
Lampiran 2	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan, 2013 - 2017.....	44
Lampiran 3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2017.....	45
Lampiran 4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2017.....	46
Lampiran 5	Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin, 2017	47
Lampiran 6	Persentase Pengguna Alat KB Penduduk Miskin pada Wanita Usia Subur, 2017.....	48

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Jakarta sebagai Ibukota metropolitan bagaikan magnet bagi para pendatang, di satu sisi menawarkan gemerlap hidup di kota, sehingga menarik banyak imigran datang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, Jakarta juga memberikan standar yang tinggi bagi para pendatang baru, dan tentunya para imigran yang datang tanpa bekal yang cukup akan segera terhimpit oleh beban hidup yang berat di Kota Jakarta. Banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Jakarta menghasilkan penambahan jumlah penduduk yang tinggi dan hal ini mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, lahan untuk tempat tinggal dan meningkatnya jumlah kejahatan. Pada akhirnya, di balik gemerlapnya kota, Jakarta juga menyimpan wajah-wajah kemiskinan, yang merupakan efek dari pembangunan yang berlangsung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1958/2002 dan diperkuat pula dengan Keputusan Gubernur Nomor

1791/2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk memotret wajah kemiskinan dan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat didalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. BPS mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin. Hal ini dapat terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan analisis ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017,
- b. Mengetahui karakteristik penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017,
- c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Panel Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.

Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di DKI Jakarta, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, perkembangan distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta.

Bab IV menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di DKI Jakarta, baik pendidikannya, kegiatannya, pengeluaran per kapitanya, penggunaan alat KB, Akses air minum dan fasilitas jamban pada penduduk miskin di DKI Jakarta.

METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran).

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

- P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.
 Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.
 V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.
j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).
p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

- K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p
 \overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

- GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.
- j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).
- p = Provinsi ke-p.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan terhadap total pengeluaran komoditi/ sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPDKP 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih

rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non makanan atau Garis Kemiskinan Non Makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai Pengeluaran per komoditi/ sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p.

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPDKP 2004) dan daerah j (kota + desa).

k = Jenis komoditi non makanan terpilih.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan merupakan Penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah Penduduk Miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah Penduduk di provinsi p.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α = 0,1,2

z = Garis Kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan jika $\alpha = 2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (P_2).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A: Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari X.

N: Jumlah penduduk total.

b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk terkaya mendapatkan paling banyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini kemudian disebut sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini dilakukan dengan pendekatan melalui data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan

pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks -L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR = Koefisien Gini.

fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i.

fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan

ketidakmerataan pendataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol, maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Loenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. garis diagonal mewakili pemetaan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B

seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemetaan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata – rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub group).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen

penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/ menengah.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen

penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks- L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famli ukuran ketimpangan “*generalized enthropy*”. Ukuan tersebut secara umum ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yng merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih

tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE(1) disebut sebagai Indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right),$$

- GE (0) juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

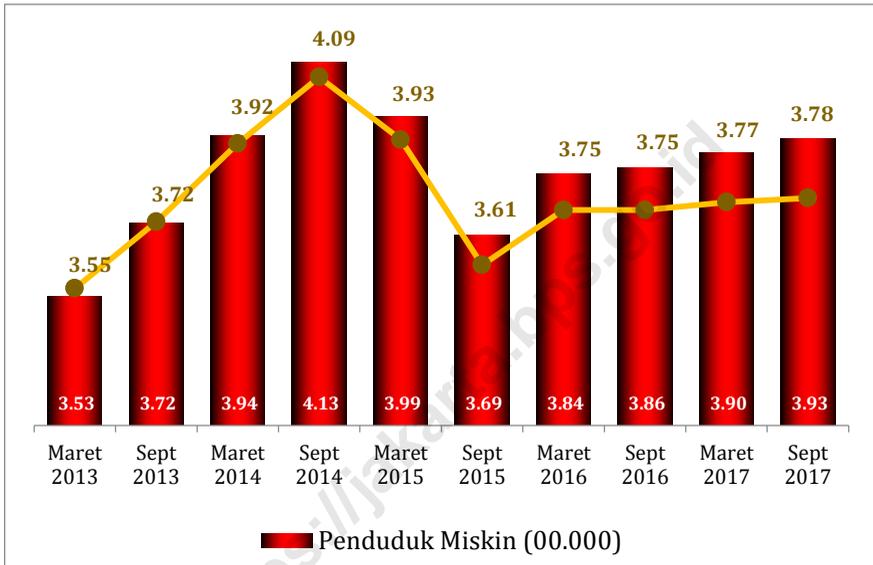
$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

KEMISKINAN DI DKI JAKARTA

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2013 - 2017

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2017 mencapai 3,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 393,13 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77% atau 389,69 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,01 poin atau meningkat sebesar 3,44 ribu orang. Sedangkan dibandingkan dengan September 2016 (3,75% atau 385,84 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,03 poin atau meningkat sebesar 7,29 ribu orang.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2013 - 2017



Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2017

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen Makanan dan Non Makanan, yang kemudian disebut Garis Kemiskinan Makanan untuk

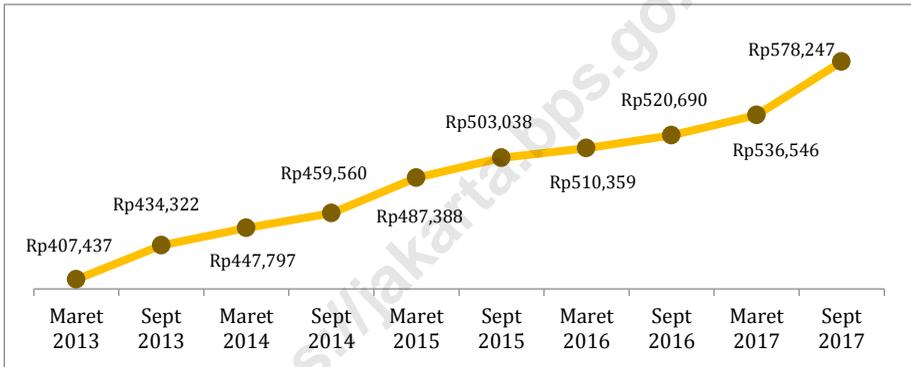
komponen Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan untuk komponen Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Selama September 2016 - Maret 2017 - September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,78 persen pada periode Maret 2017 - September 2017 (dari Rp 536.546 per kapita per bulan menjadi Rp 578.247 per kapita per bulan), dan naik sebesar 11,05 persen pada periode September 2016 -

September 2017 (dari Rp 520.690 per kapita per bulan menjadi Rp 578.247 per kapita per bulan).

Gambar 2. Perkembangan Garis kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, 2013 - 2017



Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2017

3.2. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus

harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 1.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P₂) di DKI Jakarta, September 2016 - Maret 2017 - September 2017

Bulan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P ₂)
(1)	(2)	(3)
September 2016	0,433	0,075
Maret 2017	0,488	0,097
September 2017	0,612	0,149
Perubahan:		
Maret 2017 - September 2017	0,124	0,052
September 2016 - September 2017	0,179	0,074

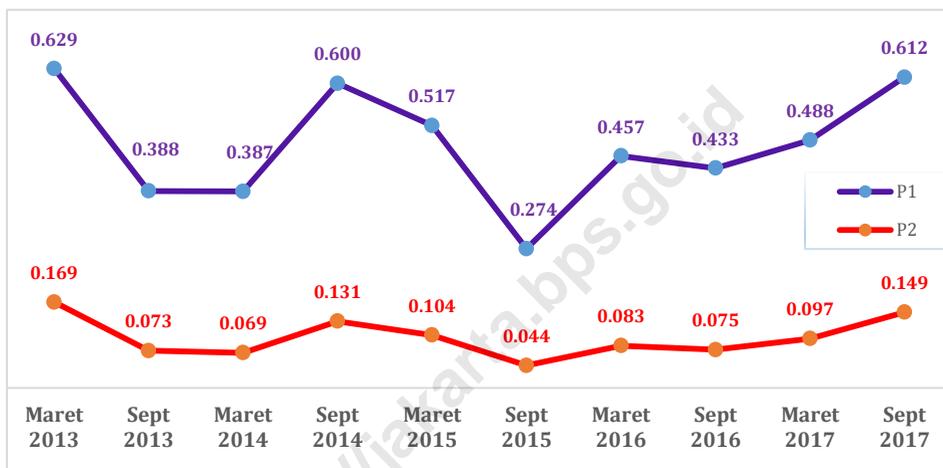
Sumber: Susenas Maret 2016 - September 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*)

memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2017 - September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,124 poin dari 0,488 pada Maret 2017 menjadi 0,612 pada September 2017. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik sebesar 0,052 poin dari 0,097 pada Maret 2017 menjadi 0,149 pada September 2017. Demikian juga jika dibandingkan dengan September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,179 poin dari 0,433 pada bulan September 2016 menjadi 0,612 pada September 2017. Begitu juga dengan Indeks Keparahan kemiskinan naik sebesar 0,074 poin, yaitu dari 0,075 pada bulan September 2016 menjadi 0,149 pada September 2017.

Gambar 3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta, Maret 2013 - September 2017



Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2017

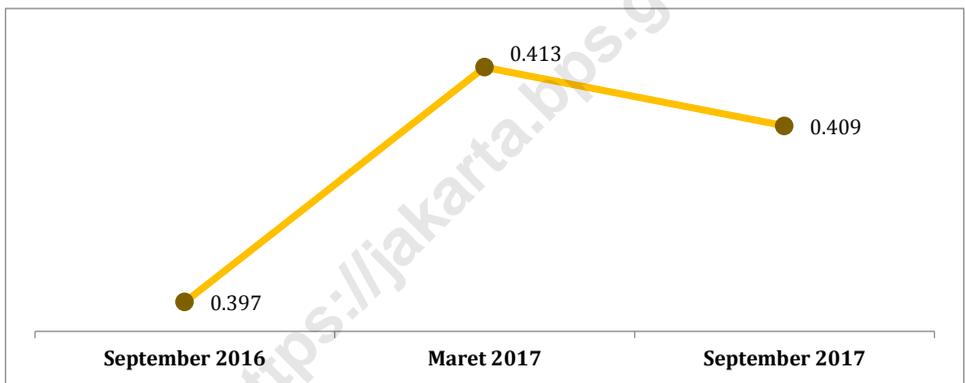
3.3. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

a. Perkembangan Koefisien Gini Periode September 2016 - September 2017

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Koefisien Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini DKI Jakarta pada September 2017

adalah sebesar 0,409, turun 0,004 poin dari 0,413 pada Maret 2017. Namun bila dibandingkan dengan September 2016, meningkat sebesar 0,012 poin.

Gambar 4
Perkembangan Koefisien Gini, September 2016 - September 2017



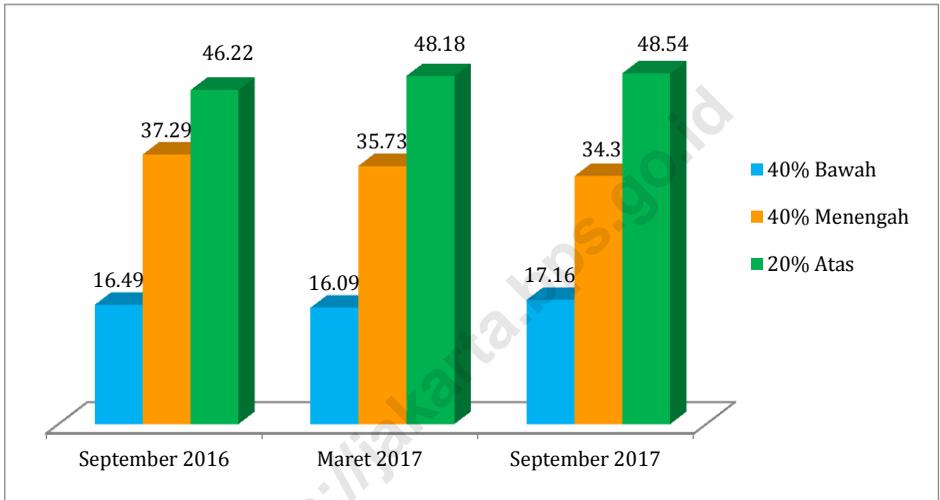
Sumber: Susenas Maret 2016 - September 2017

b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran September 2016 - September 2017

Selain Koefisien Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia.

Pada September 2017, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,16 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2017 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 16,09. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 16,49 persen. Persentase pendapatan penduduk kelompok terbawah ini mengalami kenaikan pada September 2017.

Gambar 5
Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk,
September 2016 - September 2017



Sumber: Susenas Maret 2016 - September 2017

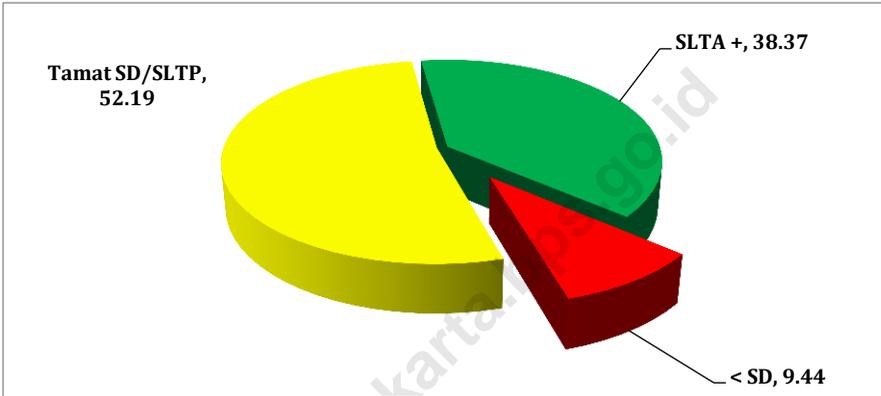
PROFIL KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

4.1. Pendidikan Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah distribusi persentase penduduk miskin berdasarkan pendidikan yang ditamatkannya.

Gambar 6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2017



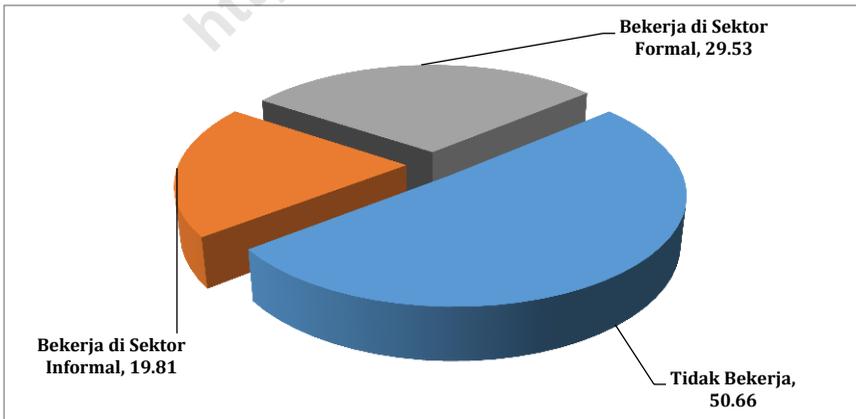
Sumber: Susenas Maret 2017

Dari hasil olah Susenas Maret 2017, pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas adalah Tamat SD/SLTP yaitu sebanyak 52,19 persen. Penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SLTA ke atas ada sebanyak 38,37 persen dan penduduk miskin yang hanya menamatkan pendidikan dibawah SD hanya sebesar 9,44 persen.

4.2. Kegiatan Bekerja Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Status Bekerja, Tahun 2017



Sumber: Susenas Maret 2017

Dari gambar 7 terlihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor Informal ada sebanyak 19,81 persen, di sektor Formal sebanyak 29,53 persen dan sebanyak 50,66 persen penduduk tidak bekerja. Hampir setengah dari penduduk miskin yang berusia 15 tahun ke atas yang berstatus tidak bekerja.

Sukirno (2004), menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Suparno (2010) menemukan bahwa banyaknya

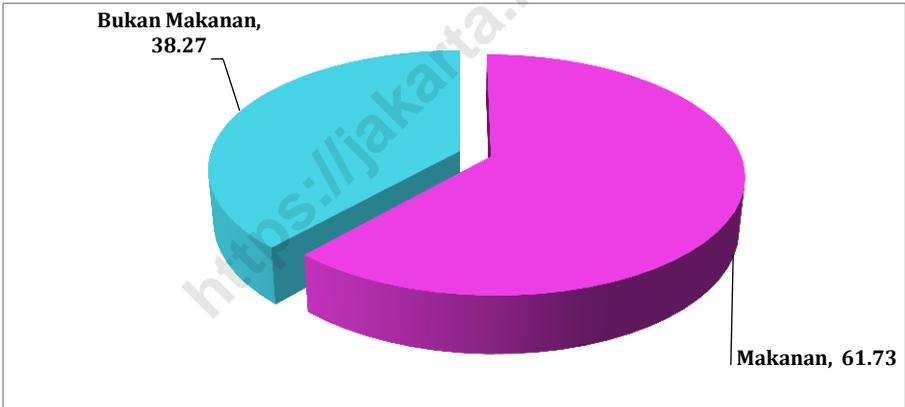
pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia.

4.3. Pengeluaran Per Kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya (Sadono Sukirno, 2000). Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan

Makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di negara yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi (BPS).

Gambar 8. Persentase Pengeluaran Per Kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin, Tahun 2017



Sumber: Susenas Maret 2017

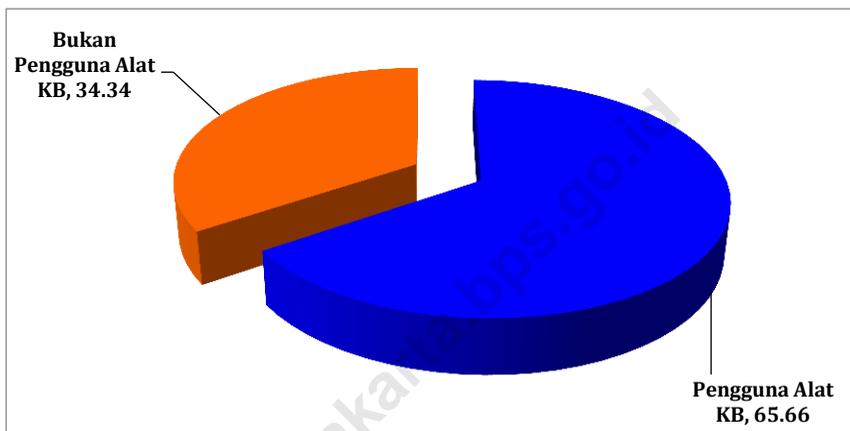
Dari hasil olah Susenas Maret Tahun 2017 terlihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk miskin lebih besar di pengeluaran makanan (61,73 persen dari total pengeluaran) dibandingkan

pengeluaran non makanan (38,27 persen dari total pengeluaran makanan).

4.4. Penggunaan Alat KB Penduduk Miskin pada Wanita Usia Subur

Pengendalian jumlah penduduk menjadi isu yang sangat penting karena laju pertumbuhan penduduk yang terkendali menjadi kunci dari kualitas sumber daya manusia di suatu area. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu area maka akan semakin rendah kualitas sumber daya manusianya. Di Indonesia, jumlah penduduk yang begitu besar, dengan kualitas penduduk rendah, itu berbahaya (Sudibyo Alimoeso, 2011). Sebuah keluarga dengan dua anak dan berpenghasilan pas-pasan, tentu akan lebih mudah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya dibandingkan keluarga yang anaknya banyak. Keluarga dengan kondisi sosial ekonominya rendah dan anaknya banyak, tentu akan sulit mewujudkan peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya.

Tabel 2.
Persentase Wanita Usia Subur (15-49 tahun) Berstatus Miskin Yang Menggunakan Alat KB, Tahun 2017



Sumber: Susenas Maret 2017

Berdasarkan hasil olah Susenas Maret 2017, Wanita Usia Subur berstatus Miskin yang menggunakan alat KB ada sebanyak 65,66 persen dan masih ada 34,34 persen sisanya yang tidak menggunakan alat KB.

Sebanyak 34,34 persen wanita usia subur yang berstatus miskin masih belum menggunakan alat KB tentunya masih terlalu banyak untuk mendukung keberhasilan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

LAMPIRAN

<https://www.jakarta.bps.go.id>

**Lampiran 1. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase
Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks
Keparahan Kemiskinan, Maret 2013 - September 2017**

Periode	Penduduk Miskin (ribu)	P₀ (%)	P₁	P₂
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maret 2013	353.0	3.55	0.629	0.169
Sept 2013	371.7	3.72	0.388	0.073
Maret 2014	393.98	3.92	0.387	0.069
Sept 2014	412.79	4.09	0.600	0.131
Maret 2015	398.92	3.93	0.517	0.104
Sept 2015	368.67	3.61	0.274	0.044
Maret 2016	384.30	3.75	0.457	0.083
Sept 2016	385.84	3.75	0.433	0.075
Maret 2017	389.69	3.77	0.490	0.100
Sept 2017	393.13	3.78	0.612	0.149

Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2017

**Lampiran 2. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan, 2013 -
2017**

Periode	GK (Rp/kapita/ bulan)	GKM		GKNM	
		Rp/kapita/ bulan	%	Rp/kapita/ bulan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maret 2013	407,437	268,419	65.88	139,018	34.12
Sept 2013	434,322	278,706	64.17	155,615	35.83
Maret 2014	447,797	290,030	64.77	157,766	35.23
Sept 2014	459,560	297,543	64.75	162,017	35.25
Maret 2015	487,388	319,595	65.57	167,793	34.43
Sept 2015	503,038	327,678	65.14	175,361	34.86
Maret 2016	510,359	329,644	64.59	180,715	35.41
Sept 2016	520,690	334,938	64.33	185,752	35.67
Maret 2017	536,546	347,383	64.74	189,163	35.26
Sept 2017	578,247	383,192	66.27	195,054	33.73

Sumber: Susenas Maret 2013 - September 2017

**Lampiran 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15
Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2017**

No	Kab/Kota	< SD	Tamat SD/SLTP	SLTA +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Seribu	15.88	44.16	39.96
2	Jakarta Selatan	9.82	42.92	47.26
3	Jakarta Timur	4.60	62.89	32.52
4	Jakarta Pusat	10.75	43.00	46.25
5	Jakarta Barat	6.68	63.17	30.15
6	Jakarta Utara	17.61	59.17	23.21
DKI Jakarta		9.45	52.19	38.37

Sumber: Susenas Maret 2017

Lampiran 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2017

No	Kab/Kota	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Seribu	60.51	23.26	16.23
2	Jakarta Selatan	52.83	14.79	32.38
3	Jakarta Timur	49.49	26.13	24.38
4	Jakarta Pusat	53.71	20.67	25.62
5	Jakarta Barat	56.47	14.85	28.68
6	Jakarta Utara	36.92	27.09	35.98
DKI Jakarta		50.66	19.81	29.53

Sumber: Susenas Maret 2017

Lampiran 5. Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin, 2017

No	Kabupaten/Kota	Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Seribu	74.70	25.30
2	Jakarta Selatan	59.07	40.93
3	Jakarta Timur	62.48	37.52
4	Jakarta Pusat	62.74	37.26
5	Jakarta Barat	57.49	42.51
6	Jakarta Utara	68.62	31.38
DKI Jakarta		61.73	38.27

Sumber: Susenas Maret 2017

**Lampiran 6. Persentase Pengguna Alat KB Penduduk
Miskin pada Wanita Usia Subur, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Pengguna Alat KB	Bukan Pengguna Alat KB
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Seribu	71.35	28.65
2	Jakarta Selatan	72.17	27.83
3	Jakarta Timur	58.60	41.40
4	Jakarta Pusat	71.28	28.72
5	Jakarta Barat	37.01	62.99
6	Jakarta Utara	76.51	23.49
DKI Jakarta		65.66	34.34

Sumber: Susenas Maret 2017

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36-38

Paseban, Senen.

Telp. (021)31928493,

Fax (021)3152004

Email : bps3100@bps.go.id

Website : <http://jakarta.bps.go.id>